Sejarah Parkindo

(per 12 Maret 2006)

I. Pengantar

Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia mencatatat bahwa umat Kristen Indonesia terlibat secara aktif , baik di medan perjuangan phisik maupun di medan perjuangan politik. Untuk mengetahui keterlibatan umat Kristen dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan penting tentang peranan umat Kristen dalam proses integrasi nasional. Catatan-catatan penting itu antara lain :

1. Dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUUKI) yang beranggota 60 orang terdapat 3 (tiga) orang tokoh Kristen yaitu : Mr.A.A.Maramis, Mr. Johanes Latuharhary dan Parada Harahap.

2. Selain sebagai anggota BPUUKI, mereka juga terpilih sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir.Soekarno. Ketiga tokoh Kristen ini juga berada diantara 19 orang anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar.

3. Agar semua unsur bisa terwakili dalam Panitia Penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar, Ir.Soekarno selaku Ketua Panitia menambah wakil-wakil dari daerah. Terpilihlah 2(dua) tokoh Kristen lagi yaitu Dr.Sam Ratulangi mewakili Celebes (sekarang Sulawesi) dan Dr.J.Leimena mewakili Maluku.Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945 pukul 11.16, Dr. Sam Ratulangi mempersoalkan dua hal penting yaitu :

• Masalah Anggaran Belanja Negara yaitu bagaimana kalau Anggaran Belanja yang disampaikan Pemerintah ke DPR ditolak. Karena dalam Rancangan UUD belum ada pasal yang mengatur hal tersebut. Dr.Sam Ratulangi mengusulkan : apabila DPR menolak Anggaran Belanja yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya. Usul tersebut diterima menjadi pasal 23 UUD yang berbunyi : “ ….. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Pemerintah, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya”.

• Masalah dekonsentrasi serta desentralisasi. Dr Sam Ratulangi mengusulkan : agar daerah-daerah diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Tentu dengan persetujuan bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia dari satu Negara. Biarpun demikian kebutuhan, keperluan daerah-daerah disana harus mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu dengan mengadakan suatu peraturan yang akan menyerahkan kepada pemerintahan daerah kekuasaan penuh untuk mengurus keperluan daerahnya sendiri.

4. Selain Dr.Sam Ratulangi, ketika membicarakan pasal tentang agama, dalam rapat

Panitia penyusun UUDU tanggal 15 Juli 1945 pukul 22.20, Mr.Latuharhary juga menanggapi pernyataan anggota Abdul Fatah Hasan tentang pasal 28 ayat 2 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing". Mr, Latuharhary mengatakan kalau bunyinya: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang beragama lain", maka artinya menjadi hilang. Sebab maksud Panitia, menghormati agama bukan menghormati orang yang memeluk agama. Jadi, kalau diganti dengan "untuk yang memeluk"artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat itu bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh Panitia Kecil itu" (lihat Risalah Sidang BPUPKI-PPKI hal.336-338).

II

Lahirnya PARKINDO

5. Maklumat pemerintah No.X/Th.1945 tertanggal 3 November 1945 sesungguhnya merupakan tanggapan atas pendapat dunia internasional terutama negara-negara sekutu, bahwa tuntutan untuk merdeka hanyalah keinginan Soekarno dan Pemerintahnya. Maklumat tersebut membolehkan masyarakat membentuk partai politik sebanyak-banyaknya. Maklumat itu juga sekaligus menjawab rumors yang berkembang dalam masyarakat bahwa Soekarno dan Mohamad Hatta akan menjadikan Partai Nasioal Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. (catatan:Mr.A.A.Maramis, Mr.Johanes Latuharhary, Dr.Sam Ratulangi dan Parada Harahap adalah anggota PNI, kecuali Dr.J.Leimena belum masuk partai manapun). Maklumat Pemerintah tersebut telah mendorong sekelompok orang Kristen Indonesia untuk menggumuli pembentukan sebuah Partai Kristen.

6. Serentetan pertemuan diadakan oleh para tokoh Kristen (Protestan dan Katolik) di Jakarta untuk menggumuli pembentukan sebuah partai bagi seluruh umat Kristen Indonesia. Tanggal 9 November 1945 bertempat di gedung Gereja Pasundan – Jl.Kramat Raya No.45, para tokoh Protestan dan Katolik kembali mengadakan pertemuan. Dari pihak Protestan hadir : Domine (Ds) Probowinoto, DR.Mr.Sutan Gunung Mulia, Ir. Fredrick Laoh, DR.Ir.W.Z.Johanes, J.K.Panggabean, Soedarsono, Maryoto dan Martinus Abe4dnego; dari pihak Katolik hadir Soeradi dan Hadi. Pertemuan dipimpin oleh Ds. Probowinoto. Ketika peserta pertemuan sepakat membentuk sebuah Partai Kristen, utusan Katolik mengundurkan diri dengan alasan akan membicarakannya dahulu dengan Pimpinan Gereja Katolik.

7. Akhirnya pertemuan malam itu sepakat membentuk sebuah partai untuk umat Kristen Protestan dengan nama Partai Kristen Nasional. Nama itu diusulkan oleh DR.Mr .Sutan Gunung Mulia. Peserta pertemuan secara aklamasi memilih DR.Ir. W.Z.Johanes sebagai Ketua dan

Maryoto sebagai Sekertaris. Tanggal 10 November 1945, para tokoh Kristen Protestan itu mendeklarasikan berdirinya Partai Kristen Nasional.

8. Kongres ke-I Partai Kristen Nasional tanggal 6 dan 7 Desember 1946 di Solo menghadirkan seluruh Partai dan organisasi Kristen yang ada di Indonesia waktu itu, antara lain :

a. PARKI (Partai Kristen Indonesia) – Medan

b. Persatuan Masehi Indonesia -- Jawa

c. Perserikatan Kaum Christen - Jawa

d. Perserikatan Christen Jawi - Jawa

e. Partai Masehi - Pematang Siantar

Catatan: Partai Masehi Pematang Siantar adalah penjelmaan dari Perserikatan Christen Indonesia (PERCHI) yang berdiri sebelum Perang Dunia II di Pematang Siantar,

9. Pada Kongres itulah para peserta sepakat mengganti nama Partai Kristen Nasional menjadi Partai Kristen Indonesia disingkat PARKINDO. Kongres juga memilih Ds.Probowinoto menggantikan DR.Ir.W.Z.Johanes sebagai Ketua dan Mr.A.M. Tambunan menggantikan Maryoto sebagai Sekertaris. Mr.A.M.Tambunan tidak lama menjabat Sekertaris PARKINDO, karena terpilih sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia diganti oleh Martinus Abednego.

10. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, PARKINDO selalu terwakili dalam Kabinet. Posisi yang sering diberikan kepada PARKINDO adalah sebagai Menteri Kesehatan. Hanya pada tiga Kabinet PARKINDO tidak terwakili yaitu pada:

a. Kabinet I - Kabinet Presidensiel pimpinan PM.Mohamad Hatta (tanggal 2 September – 14 November 1945)

b. Kabinet PM Soesanto (Kabinet Peralihan) 29 Desember 1949 – 21 Januari 1950 dan

c. Kabinet PM Ali Sastroamidjojo I: 1 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955.

Tokoh PARKINDO Dr.J.Leimena sejak Dekret 5 Juli 1959 selalu dipakai Presiden Soekarno dalam pemerintahannya. Dalam Kabinet Karya (1959) pimpinan Djuanda, Dr.J.Leimena menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Utama II. Presiden Soekarno menggunakan istilah Menteri Utama untuk jabatan Perdana Menteri karena setelah kembali ke UUD 1945, Presiden selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan. Ketika Presiden Soekarno merombak kabinet pada tahun 1960, Dr.J.Leimena kembali diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II. Dr.J.Leimena juga sering menjadi Pejabat Presiden selama Presiden Soekarno keluar negeri. Tidak kurang dari tujuh kali Dr.Leimena dilamtik dan diambil sumpahnya sebagai Pejabat Presiden selama pemerintahan Soekarno.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, PARKINDO hanya sekali terwakili dalam Kabinet sesudah Pemilihan Umum 1971 yaitu dalam Kabinet Pembangunan I (1973 -1978) sebagai Menteri Sosial yang dijabat oleh DR. A.M.Tambunan SH.

Jadi sesungguhnya umat Kristen punya andil cukup besar dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya setelah Negara ini merdeka, umat Kristen semakin terpinggirkan bahkan dianggap “warga Negara kelas dua” . Umat Kristen selalu dituntut melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara tanpa diperhatikan hak-haknya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini kepentingan dan hak-hak kewarganegaraan umat Kristen sepertinya “sengaja diabaikan” melalui kebijakan-kebijakan politik nasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara --- penguasa ---yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan non Kristen. Sebagai contoh : dibawah pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998) ratusan gereja dibakar, ribuan umat Kristen dibunuh (di Maluku, Poso, di Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat, di Sampit - Kalimantan Tengah, di Situbondo -Jawa Timur, di Garut dan Bekasi - Jawa Barat). Pemerintah waktu itu membiarkannya.

Disamping itu orang-orang yang menamakan diri “tokoh Kristen” di partai berkuasa --- GOLKAR --- juga tidak berani bersuara memperjuangkan hak-hak umat Kristen yang ditindas oleh penguasa. Alasannya, mereka adalah kelompok minoritas dalam partai tersebut. Dengan kata lain mereka menyandang predikat minoritas ganda. Karena secara nasional umat Kristen sudah minoritas, dalam partai juga orang Kristen itu minoritas. Melihat kondisi ini, para kader organisasi Kristen yang tidak tergabung dalam partai tertentu serta beberapa kader Kristen di PDI-P terpanggil untuk mengaktifkan kembali Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) yang sejak 10 Januari 1973 diharuskan oleh Presiden Soeharto bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Berdasarkan UU No.2 tahun 1999 yang membolehkan berdirinya partai politik, para kader Kristen itu mendeklarasikan pengaktifan kembali Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) pada tanggal 5 Juli 2000, dengan Ketua Umum Drs.Tiop Harun Sitorus dan Sekertaris Umum Patmono Sk STH.

Drs.Tiop Harun Sitorus meninggal pada tanggal 16 Oktober 2000 bertepatan dengan tanggal pengesahan dan pengakuan berdirinya Partai Kristen Indonesia oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Kristen Indonesia John Tahamata dan beberapa Ketua DPP lainnya, bahwa sesudah beliau tiada maka Pdt.DR.JM Pattiasina supaya menganggantinya sebagai Ketua Umum. Berdasarkan pesannya itu kemudian dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat bulan Desember 2000 ditetapkanlah Pdt.DR JM Pattiasina sebagai Ketua Umum dan Patmono Sk STH tetap sebagai Sekertaris Umum. Dibawah pimpinan DR JM Pattiasina, Partai Kristen Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) ke-I. Semula RAPIMNAS ke-I itu direncanakan akan diselenggarakan bulan April tahun 2002, tetapi karena satu dan lain hal diundur sampai bulan Juli 2002.

III.

Persiapan menghadapi Pemilu

Sebelum Rapat Pimpinan Nasional ke-I tanggal 14 -17 Juli 2002. Rapat Dewan Pimpinan Pusat PARKINDO tanggal 28 April 2002, memberhentikan Patmono Sk.STH dari jabatan Sekertaris Umum PARKINDO dan diganti oleh Drs. Radjakarina Brahmana. Pergantian tersebut kemudian disahkan pada Rapat Pimpinan Nasional I tersebut. Dalam RAPIMNAS ke-I itu pula diputuskan sebutan untuk jabatan Sekertaris Umum diganti menjadi Sekertaris Jenderal.

Tahun 2003 tepatnya tanggal 20 – 22 Februari, dilaksanakan Kongres ke-X Partai Kristen Indonesia di Surabaya. Kongres ini disebut Kongres ke-X, karena Kongres terakhir sebelum dipaksa Presiden Soeharto bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), PARKINDO mengadakan Kongres ke-IX di Sukabumi. Setelah DR.JM Pattiasina meninggal tanggal 7 November 2004, Dewan Pimpinan Pusat PARKINDO dalam rapatnya tanggaal 10 Januari 2006 memutuskan mengangkat DR. Max Nikijuluw sebagai pejabat Ketua Umum mengganti DR.JM.Pattiasina yang meninggal dunia tanggal 7 November 2004. Kongres ke-X tahun 2003 itu mengesahkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang ada sejak deklarasi pengaktifan kembali PARKINDO tanggal 5 Juli 2000 dengan perubahan-perubahan dimana DR.JM Pattiasina tetap sebagai Ketua Umum dan Drs. Radjakarina Brahmana sebagai Sekjen. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kristen Indonesia yang ada sekarang adalah Pengurus yang disahkan Kongres Surabaya itu adalah sebagai berikut:

Pj. Ketua Umum: DR.Max Nikijuluw

Ketua : D Parlin Sitorus SH MS

Ketua : Drs.Peter Tomasoa

Ketua : Drs.Soemitro SH

Ketua : Edy Tumengkol

Ketua : Ir.Arnold Leopolod Wuon

Ketua : A.D.Sitorus

Ketua : Drs.Joni Patandung MM

Ketua : Bachtiar Sitanggang SH

Ketua : Ny.Lucer Sitorus br Sirait

Ketua : Jan Worotikan

Ketua : Adrian Sitorus, SIP MM (meninggal Oktober 2004)

Ketua : Drs.J. Hutasoit SE.MM

Ketua : Theo Solany

Ketua : Drs.Monang Sitorus SH MBA

Ketua : Pdt.Martinus Saiya, Bsc.STh

Ketua : Pdt. Armyn Tulus Sihite STh

Ketua : DR.Hendrik Ruru

Ketua : Pdt.DR.Ch.Polimpung

Ketua : Pdt.Obednego Mauri

Sekjen : Drs. Radjakarina Brahmana

Wakil Sekjen : Pdt. Johane3s Henukh, STh MA

Wakil Sekjen : Willy Rawung

Wakil Sekjen : Pdt.Nicodemus Sabudin, STh.MA

Wakil Sekjen : Pdt.Manuel Esau Raintung STh MBA

Wakil Sekjen : Dolfie Maringka HA

Wakil Sekjen : Melky Moay S.Pd.

Bendahara Umum: Ir.Arnold Leopold Wuon (Ketua merangkap Bendahara

Umum)

Bendahara : Drs.Rudolf Jafet Sumampouw

Dibawah kepemimpinan Pdt.DR.JM Pattiasina, PARKINDO menapak dengan pasti memasuki verifikasi administrative dan faktual menghadapi Pemilihan Umum 2004. PARKINDO tidak berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2004 karena beberapa Dewan Pimpinan Cabang gagal dalam verifikasi faktual. Karena tidak berhasil menjadi peserta pemilu, kondisi PARKINDO semakin terpuruk. Untuk mengembalikan semangat para kader partai, DR JM Pattiasina mengusulkan diadakan Rapat Pimpinan Nasional ke-V pada tanggal 28 Juli 2004 di Jakarta untuk membahas sikap PARKINDO memasuki Pemilu Presiden tahap kedua, bulan September 2004. Dalam Rapimnas itu hadir 19 Dewan Pimpinan Daerah PARKINDO dari 29 Dewan Pimpinan Daerah yang ada diseluruh Indonesia. Rapimnas ini memutuskan: massa Partai Kristen Indonesia dalam Pemilu Presiden bulan September, mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla.

DR JM Pattiasina meninggal pada tanggal 7 November 2004 karena menderita penyakit diabetes. Lebih satu tahun (7 November 2004 – 10 Januari 2006) jabatan Ketua Umum dibiarkan kosong. Selama itu surat menyurat Partai dijalankan oleh Sekjen dan ketua-ketua yang ada. Baru pada tanggal 10 Januari 2006 dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat PARKINDO, diputuskan mengangkat Max Nikijuluw sebagai Pejabat Ketua Umum sampai Kongres ke-XI. Sebelumnya Max Nikijuluw adalah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat. Dengan diangkatnya Max Nikijuluw sebagai Pejabat Ketua Umum, maka Ir.Arnold Wuon yang semula adalah salah satu Ketua, dalam rapat yang sama diangkat sebagai Bendahara Umum mengganti Max Nikijuluw . Ir.Arnold Wuon selain diangkat sebagai Bendahara Umum juga ditetapkan sebagai Ketua Panitia Nasional Kongres ke-XI.

Pada tahun 2003 PARKINDO disahkan sebagai Badan Hukum oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Saat ini PARKINDO memiliki 29 Dewan Pimpinan Daerah di 29 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia, 386 Dewan Pimpinan Cabang ditingkat kabupaten dan kurang lebih 1000 Dewan Pimpinan Anak Cabang ditingkat kecamatan. Karena gagal sebagai peserta Pemilihan Umum 2004 lalu, PARKINDO tidak punya wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Sebagai badan hukum Partai Kristen Indonesia terus berusaha melaksanakan program kerjanya. Sejak tahun 2003 menjelang Pemilu sebetulnya Partai Kristen Indonesia selain mengerjakan program politik berkaitan dengan Pemilu, juga melaksanakan program-program sosial.

IV.

Program Sosial

Program Sosial yang sudah berjalan sejak tahun 2003 ada tiga, yaitu Program membantu pembangunan kembali Gereja, Program membantu anak yatim piatu korban kerusuhan di Maluku dan Poso – Sulawesi Tengah serta Program pengiriman Guru Sekolah Dasar (SD) ke Papua untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di wilayah Papua.

Pertama: Program membantu pembangunan kembali gedung gereja-gereja di Indonesia Timur: Sulawesi Tengah dan Maluku; dewasa ini Partai Kristen Indonesia memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja di Maluku, setelah itu baru berusaha membantu gereja-gereja didaerah lain termasuk Poso – Sulawesi Tengah. Partai Kristen Indonesia dengan segala keterbatasan terutama keterbatasan dana terus berusaha membantu pembangunan kembali 18 buah gereja di Maluku dengan rincian :

1. Di Pulau Haruku : 5 buah
2. Di Pulau Saparua : 4 buah
3. Di Pulau Buru : 5 buah
4. Di Pulau Aru/Dobo : 1 buah
5. Di Halmahera : 3 buah
6. Di Pulau Alor (NTT) : 1 buah
7. Di Sikka (NTT) : 1 buah

Keterbatasan dana ini menyebabkan program membantu pembangunan kembali gereja-gereja tersebut sejak tahun 2004 tersendat. Padahal pembangunan kembali rumah gereja itu sangat dibutuhkan oleh warga jemat di desa desa tersebut. Karena selama belum ada gedung gereja yang permanan, warga jemat di daerah-daerah itu tetap melakukan kebaktian walau di gedung /rumah ibadah darurat. Desa-desa yang perlu segera dibantu adalah: 2 (dua) jemat di Buru yaitu: jemat didesa Ewiri dan jemat didesa Waemulang serta 2(dua) jemat di Seram yaitu : jemat di desa Liliama dan jemaat di desa Elnusa. Partai Kristen Indonesia dengan segala kemampuan yang ada terus berusaha membantu, agar warga jemat di daerah-daerah itu tetap dapat melakukan kegiatan peribadatan sebagaimana layaknya.

Kedua: Selain program membantu pembangunan kembali gedung gereja, Partai Kristen Indonesia juga berusaha membantu anak-anak korban peristiwa kerusuhan di Maluku. Kurang lebih ada sekitar 200 anak korban kerusuhan yang dewasa ini dibantu oleh Dewan Pimpinan

Daerah Partai Kristen Indonesia provinsi Maluku. Anak-anak tersebut ada yang kehilangan kedua orang tuanya dan ada pula yang kehilangan ibu atau ayahnya .

Ketiga : Program pengiriman tenaga Guru Sekolah Dasar ke Papua untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat dasar di Papua. Data yang diperoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Kristen Indonesia Papua, mengungkapkan bahwa banyak desa terutama di kabupaten-kabupaten pedalaman Papua, banyak anak didik walau sudah tamat Sekolah Dasar masih tetap saja buta huruf. Ini semua akibat kurangnya tenaga guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil seperti di Papua.

Akibatnya ada daerah yang terpaksa harus dilayani hanya oleh seorang tenaga guru yang mengajar di lebih dari satu Sekolah Dasar di lebih dari satu desa yang jaraknya cukup jauh. Hal ini disebabkan oleh keengganan orang bertugas didaerah-daerah terpencil terutama di Papua. Karena biaya hidup yang terlalu tinggi dan sulitnya transportasi darat. Sebagaimana diketahui , satu-satunya sarana transportasi untuk mencapai daerah-daerah pedalaman Papua adalah menggunakan pesawat terbang. Hanya dengan pesawat terbang orang bisa mencapai daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Puncak Jaya dan desa-desa di Kabupaten Mimika serta banyak lagi desa di kabupaten lainnya di Papua. Belum ada jalan darat yang bisa menghubungkan daerah-daerah terpencil itu dengan kota-kota besar di Papua. Partai Kristen Indonesia telah mulai melakukan pendataan kondisi pendidikan di beberapa Kabupaten pedalaman Papua. Dewan Pimpinan Pusat telah menugaskan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kristen Indonesia Papua untuk mendata jumlah desa dan Sekolah Dasar yang perlu segera dibantu .

Ketiga program ini membutuhkan dana yang besar, jauh diatas kemampuan Partai Kristen Indonesia sekarang ini. Tanpa campur tangan Tuhan Yesus, semua program ini tidak akan berhasil. Bahwa secara manusiawi, dengan kondisi PARKINDO seperti sekarang, upaya ini merupakan sesuatu yang mustahil. Tetapi dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memakai tangan anak-anak Tuhan lainnya untuk membantu pelaksanaan program sosial ini. Program ini merupakan pergumulan panjang Partai Kristen Indonesia sejak dideklarasikan pengaktifannya kembali pada tahun 2000. Tetapi dengan menyerahkan seluruh pergumulan ini kedalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan tulus dan penuh keyakinan akan kebesaran kasihNYA, kami percaya Tuhan akan bekerja sehingga kesulitan ini dapat diatasi. Bagi anak-anak Tuhan yang berkeinginan untuk membantu program Partai Kristen Indonesia ini, dapat menyalurkan bantuannya lewat Koperasi POHON TERANG dengan dikirim lewat Bank …………… pada No.rekening ……………….. .